

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk dengan landasan hukum sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai **tugas**; membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dipedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sedangkan

Fungsinya adalah :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;

- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Kepegawaian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari pejabat Struktural yaitu 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 2 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bidang/Bagian, 6 orang Kepala Seksi, Pejabat Pelaksana sebanyak 8 orang. Apabila dilihat dari struktur organisasi yang ada dengan standar staf minimum, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih sangat jauh dari standar kebutuhan minimum.

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai **Tugas pokok dan Fungsi** Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Sub Bagian/Sub Bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai **Tugas** memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi sub bagian umum dan kepegawaian, Perencanaan dan pelaporan, dan Keuangan. serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam menyelenggarakan tugasnya itu Sekretaris mempunyai Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan, dan pelaporan dan Keuangan.
- Memberi dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan, dan pelaporan dan Keuangan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan, dan pelaporan dan Keuangan.
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam kegiatan sehari-hari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng dibantu oleh 2 (dua) orang Kasubag yaitu :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh **Kepala Sub Bagian** yang mempunyai **tugas** Menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi , urusan ketatausahaan Badan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh **Kepala Sub Bagian** yang mempunyai **tugas** menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola, dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan dan pelaporan serta melakukan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang kualitas Hidup Perempuan, sesuai perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Bidang ini mempunyai fungsi :

- Merumuskan kebijakan teknis dibidang Kualitas Hidup Perempuan yang meliputi Pengarusutan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kualitas hidup Perempuan meliputi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
- Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di lingkup bidang kualitas hidup perempuan
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang kualitas hidup perempuan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam melaksanakan kegiatan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi yaitu :

Seksi Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender.

Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan seksi Pemberdayaan Perempuan.

Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga di pimpin oleh seorang Kepala seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan tehnik, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan seksi ketahanan dan Kualitas Keluarga.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak di pimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan tehnik, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Di dalam melaksanakan kegiatan Bidang Perlindungan Hak Perempuan di bantu oleh 3 (tiga) orang kepala Seksi yaitu :

- Seksi Perlindungan Hak Perempuan di pimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan tehnik, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan seksi perlindungan hak perempuan.
- Seksi Pemenuhan Hak dan perlindungan Anak di pimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan tehnik, membina mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di pimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

D. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang terurai di beberapa bidang, sebagai berikut :

Permasalahan Kesekretariatan

- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- Kurangnya jumlah SDM untuk memenuhi jabatan dan melaksanakan tugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Belum optimalnya peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

Permasalahan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- Belum maksimalnya fungsi layanan terpadu sesuai SPM bidang layanan terpadu dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Belum optimalnya peran kelembagaan pemenuhan hak perempuan dan Anak.
- Belum optimalnya pelaksanaan sistem data untuk menghimpun data korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Soppeng.
- Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak belum dimaknai secara utuh dalam kerangka keterpaduan dan

lintas sektor/Perangkat Daerah/Lembaga terkait dan masyarakat .

- Upaya pencegahan dan deteksi dini dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus.
- Belum semua puskesmas termasuk kategori puskesmas ramah anak.
- Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- Masih tingginya pernikahan usia dini.
- Masih tingginya angka perceraian dimasyarakat.

Permasalahan Bidang Kualitas Hidup Perempuan

- Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- Belum maksimalnya upaya pelaksanaan pemberdayaan perempuan secara terpadu lintas sektor utamanya bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga) .

E. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Soppeng ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIAT
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

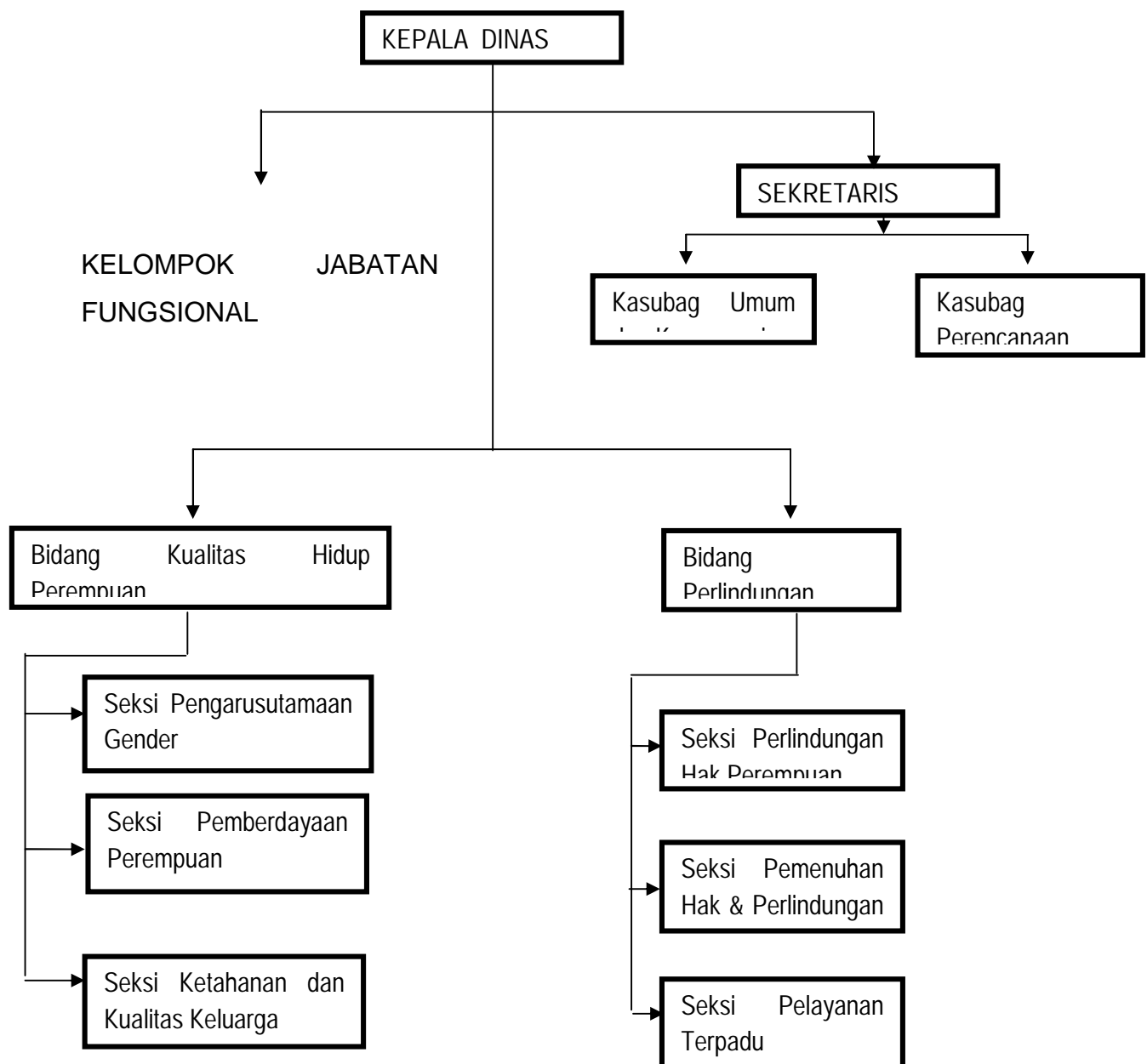
3. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

- Seksi Pengarusutamaan Gender
- Seksi Pemberdayaan Perempuan
- Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga

4. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

- Seksi Perlindungan Hak Perempuan
- Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



F. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Tabel 1.1 Komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Gender

No	JENIS KELAMIN		TOTAL
	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
1	4	15	19

Adapun keadaan pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 dengan jumlah total Pegawai sebanyak 19 orang. Dengan Jumlah laki – laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 15 orang.

Keadaan SDM/ Pegawai berdasarkan kepangkatan

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng menurut kepangkatan

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Golongan IV	2	4	6
2	Golongan III	1	10	11
3	Golongan II	1	1	2
4	Golongan I	0	0	0
	JUMLAH	4	5	19

Berdasarkan tabel diatas keadaan pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan

kepangkatan pada tahun 2018 sebagaimana pada tabel diatas jumlah pegawai laki – laki golongan IV sebanyak 2 orang dan perempuan sebanyak 4 orang sehingga total 6 orang. Jumlah pegawai laki-laki golongan III sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 10 orang sehingga total sebanyak 11 orang. Jumlah Pegawai laki- laki golongan II sebanyak 1 orang dan perempuan 1 orang dengan total sebanyak 2 orang. Dan jumlah pegawai golongan I tidak ada.

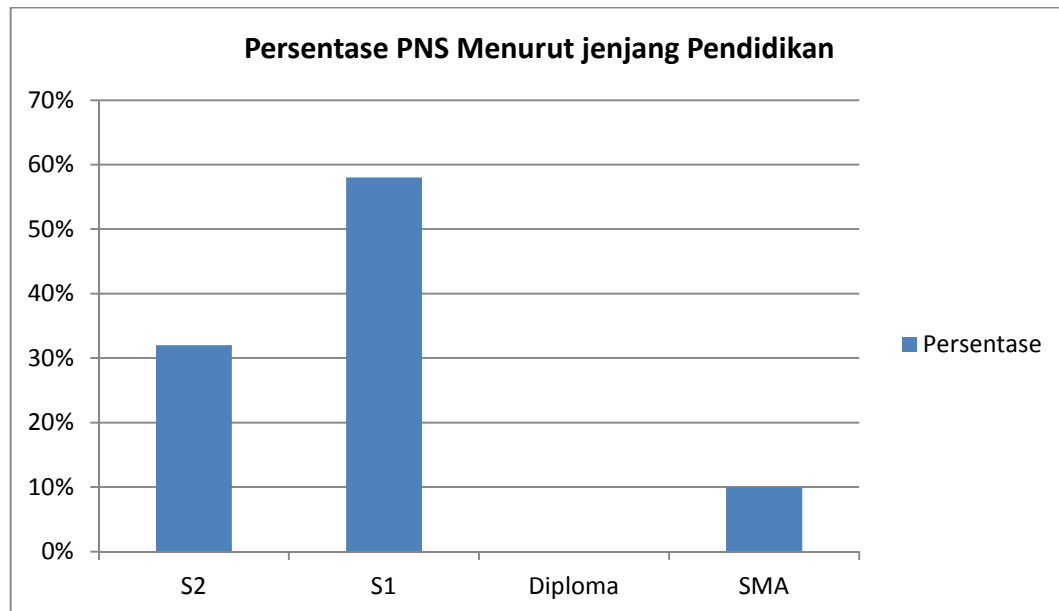
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 1.3 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TOTAL
1	S2	6
2	S1	11
3	DIPLOMA	0
4	SMA	2
	JUMLAH	19

Berdasarkan tabel diatas komposisi pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut jenjang pendidikan Tahun 2018 jumlah pegawai yang jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 orang. Jumlah pegawai yang jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang. Sedangkan jumlah pegawai yang jenjang pendidikan Diploma tidak ada. Untuk Pegawai jenjang pendidikan SMA sebanyak 2 orang.

Gambar 1.2 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan



Berdasarkan diagram diatas dapat kita lihat bahwa persentase pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan jenjang pendidikan S2 sebesar 32%, Pendidikan S1 sebesar 58%, Pendidikan Diploma 0% dan SMA sebesar 10%.

Tabel 1.4 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2018

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	S2	2	4	6
2	S1	1	10	11
3	DIPLOMA	0	0	0
4	SMA	1	1	2
	JUMLAH	4	15	19

Berdasarkan tabel diatas komposisi pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut jenjang pendidikan Tahun 2018 jumlah pegawai laki – laki yang jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang dan perempuan sebanyak 4 orang sehingga total sebanyak 6 orang. Jumlah pegawai laki – laki yang jenjang pendidikan S1 sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 10 orang. Sedangkan jumlah pegawai yang jenjang pendidikan Diploma tidak ada. Untuk Pegawai laki – laki jenjang pendidikan SMA sebanyak 1 orang dan Perempuan 1 Orang sehingga total sebanyak 2 orang.

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Tabel 1.5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

NO	ESELON	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Eselon II A	0	1	1
2	Eselon III A	1	0	1
3	Eselon III B	0	2	2
4	Eselon IV A	0	7	7
5	Fungsional	3	5	8
	JUMLAH	4	15	19

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Eselon II A sebanyak 1 orang, Eselon III A sebanyak 1 orang, Eselon III B sebanyak 2 orang, Eselon IV A sebanyak 7 orang dan fungsional sebanyak 8 orang.

G. INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 yaitu Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Kampung Sibali Peri yang artinya memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga saling bantu membantu sehingga dapat membentuk keluarga dari kurang tahan menjadi tahan.

Kampung Sibali Peri ini dilaksanakan di Desa Tetewatu dengan membina 100 rumah tangga yang kurang mampu melalui kegiatan P2K3. Walhasil Soppeng dapat meraih Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan sebagai kabupaten yang melaksanakan percepatan peningkatan peran keluarga menuju ketahanan dan kesejahteraan (P2K3) di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan sebagai kabupaten yang memiliki komitmen mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI :

"Pemerintah yang melayani dan Lebih baik"

Pada rumusan visi ini terkandung substansi "pernyataan visi" bahwa Kabupaten Soppeng "pemerintahannya akan lebih melayani" dan "daerahnya akan lebih baik". Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi iniyakni "pemerintahan yang melayani" dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik".

“Pemerintah yang lebih melayani” bermakna bahwa dalam lima tahun kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

“Kabupaten Soppeng yang lebih baik” bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Dalam pokok visi ini, Kabupaten Soppeng akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.

MISI:

Sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka ada satu misi yang terkait dengan tugas dan fungsi DPPPA tersebut, perlu lebih dipahami lagi berdasarkan penjelasan misinya yang tertulis di dalam dokumen RPJMD 2016 -2021 ada di Misi 7, yaitu Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan, Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah

fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng khususnya di Urusan Pemberdayaan Perempuan sangat terkait dengan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam RPJMD 2016 – 2021, dimana tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- Meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan
- Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan Membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, dan bertaqwa serta terlindungi
- Meningkatkan Kinerja Aparatur sasaran

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	11.05	11.30
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan Membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, dan bertaqwa serta terlindungi	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100
Meningkatkan Kinerja Aparatur sasaran	Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik	%	100	100

SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 adalah Meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan. Adapun sasarannya adalah :

- Meningkatnya kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
- Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat

Tujuan 2 adalah Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan Membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, dan bertaqwa serta terlindungi. Adapun sasarannya adalah :

- Meningkatnya efektifitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Meningkatnya kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan Anak.

Tujuan 3 adalah Meningkatkan Kinerja Aparatur sasaran. Adapun sasarannya adalah :

- Meningkatnya Efektifitas dan Efesensi Pengelolaan administrasi Umum dan Keuangan
- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor

Tabel 2.2 Sasaran dan indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTR A
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	11.05	11.30
	Persentase partisipasi Perempuan lembaga Swasta	%	88.95	90.50
	Persentase perempuan di dunia usaha	%	30.00	38.50
	Indeks Pembangunan gender (IPG)	%	98.96	99.8
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	59.76	71.7
Meningkatnya Kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi	Persentase Perempuan dalam organisasi social kemasyarakatan	%	20	30
	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	89.23	91.50
	SKPD yang menerapkan PPRG	%	0.00	30

masyarakat				
Meningkatnya efektifitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	0.037	0.024
	Jumlah Lembaga perlindungan anak	Lembaga	5	9
	Angka Melek Huruf Perempuan usia 15 Tahun keatas	%	99.62	99.90
Meningkatnya kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan	Persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap anak	%	100	100
	Jumlah sekolah ramah anak	Kecamatan	0	8
Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	%	100	100
Meningkatnya	Persentase sarana dan	%	100	100

ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100
---	-------------------------------------	---	-----	-----

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Meningkatnya efektifitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak
Meningkatnya kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Profesionalisme aparatur
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

B. PERJANJIAN KINERJA

Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan perubahan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Untuk tahun 2018 adapun perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh kepala Dinas dan Bupati seperti berikut ini :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dalam berbagai bidang Pembangunan	<p>Persentase perempuan di dalam pemerintah</p> <p>Persentase partisipasi Perempuan lembaga Swasta</p> <p>Persentase perempuan di dunia usaha</p> <p>Indeks Pembangunan gender (IPG)</p> <p>Indek Pemberdayaan Gender (IDG)</p>	<p>11,20%</p> <p>89.50%</p> <p>36%</p> <p>99.4%</p> <p>64%</p>
2.	Meningkatnya Kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat	<p>Persentase Perempuan dalam organisasi social kemasyarakatan</p> <p>Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan</p> <p>SKPD yang menerapkan PPRG</p>	<p>27 %</p> <p>90 %</p> <p>15 %</p>
3.	Meningkatnya efektifitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	<p>Rasio KDRT</p> <p>Jumlah Lembaga perlindungan anak</p> <p>Angka Melek Huruf Perempuan usia 15 Tahun keatas</p>	<p>0,30 %</p> <p>7</p> <p>99,75 %</p>

4.	Meningkatnya kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan	Presentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap anak Jumlah sekolah ramah anak	100 % 4
5.	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100 %
6.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	Rp. 134.684.250,-	
2.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga dan Perlindungan Anak	Rp. 180.760.950,-	
3.	Program Pelayanan Perkantoran	Rp. 579.597.950,-	
4.	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 160.956.850,-	
5.	Program Peningkatan pengembangan system laporan kinerja dan keuangan	Rp. 15.000.000,-	
6.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Rp. 94.439.000,-	

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan IKU. (sebagaimana terlampir)

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka jumlah pendanaan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.2.518.432.632 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Rencana Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.352.993.632	100
2	Belanja Langsung	Rp. 1.165.439.000	100
Jumlah		Rp. 2.518.432.632	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dalam berbagai bidang Pembangunan	87.821.050	7.53%
Meningkatnya Kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat	59.971.000	5.14
Meningkatnya efektifitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	116.443.550	9.99%
Meningkatnya kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan	90.101.450	7.73%
Meningkatnya Efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	699.939.925	60%
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	160.956.850	13.81%

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program sebesar Rp. 699.939.925 dengan prosentase anggaran yang besar untuk mendukung sasaran Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan dengan besaran 60%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatnya Kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat sebesar 5.14% dari total anggaran belanja langsung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata diatas capaian indicator kinerja sasaran. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan dapat dilihat pada persamaan berikut :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$c_i = \frac{r_i}{t_i} \times \frac{k}{k} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja Terbalik

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	SR
2.	76 < 90	Tinggi	R
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	T
5.	< 50	Sangat Rendah	ST

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian, maka digunakan rumus :

$$c_i = \frac{(t_i - (r_i - t_i))}{t_i} \times \frac{k}{k} \times 100\%$$

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng sebagai Lembaga Teknis yang menangani dua urusan yaitu urusan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng. Pencapaian kinerja IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pencapaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi %	Capaian (%)
1.	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	%	11.20	11,57	103.3
2.	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	%	89,50	87.62	97.89
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	99.4	97.43	98.02
4.	Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	%	64	69,35	108.35
5.	Persentase Partisipasi Perempuan di dunia usaha	%	36	60.04	166.78

6.	Persentase Perempuan dalam organisasi social kemasyarakatan	%	25	38.4	162
7.	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	90	51.33	57.03
8.	SKPD yang menerapkan PPRG	%	15	100	315
9.	Ratio KDRT	%	0.030	0,005	1.83
10.	Jumlah lembaga perlindungan anak	%	7	7	100
11.	Angka melek huruf Perempuan Usia 15 tahun keatas	%	99.75	99.41	99.65
12.	Persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap anak	%	100	100	100
13.	Jumlah kecamatan ramah anak	%	4	8	200

Berdasarkan tabel di atas dari 13 Indikator Kinerja Utama, menunjukkan bahwa realisasi kinerja sangat tinggi sebanyak 12 indikator. Sedangkan realisasi kinerja yang masih rendah sebanyak 1 indikator. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU DPPPA Kabupaten Soppeng Tahun 2018 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng Tahun 2018 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan pada tahun 2018 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran I "Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan di berbagai Bidang Pembangunan"

Dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan sasaran meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dalam berbagai Bidang Pembangunan memiliki Indikator sebanyak 5 Indikator kinerja yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

a. Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dalam berbagai bidang Pembangunan	1. Persentase partisipasi perempuan lembaga pemerintah di	%	11.20	11,57	103,3
	2. Indeks pembangunan Gender (IPG)	%	99.4	97.43	98.02
	3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	64	69.35	108.35
	4. Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga Swasta	%	89,50	87.62	97.89
	5. Persentase Partisipasi Perempuan Dunia Usaha di	%	36	76.02	211.17
Rata-rata capaian					123.75

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, Ada tiga indicator yang telah memenuhi target yaitu :

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dengan target pada pada tahun 2018 yaitu 11.20% realisasi 11,57 sehingga capaian 103.3%. Dari 574 jabatan eselon IV, 282 perempuan menduduki jabatan tersebut dengan capaian sebesar 49.12%. Dari 99 jabatan eselon III, 41 perempuan menduduki jabatan tersebut dengan capaian sebesar 29.29%. Dari 24 jabatan eselon II, 3 perempuan menduduki jabatan tersebut dengan capaian sebesar 11,11%. Sehingga persentase partisipasi perempuan dilembaga

pemerintah yang menduduki eselon II masih kurang dari target. Hal ini disebabkan masih adanya rasa inferior dari diri perempuan untuk mengikuti lelang jabatan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan sosialisasi tentang peran penting perempuan dalam pengambilan keputusan di jabatan strategis.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2018 dengan target 64% realisasi 69.35% dengan capaian kinerja 108.35. IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Adapun dimensi dalam mengukur IDG ada yaitu: proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD pada tahun 2018 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 30 orang dan jumlah perempuan sebanyak 8 orang dengan capaian 26% dari target 30%, persentase perempuan sebagai tenaga manager, professional, kepemimpinan dan tekhnisi. Hal ini bisa kita lihat dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dengan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 40097 dan jumlah angkatan kerja perempuan 78107 sehingga capain 51,33%.
3. Partisipasi Perempuan di dunia usaha pada tahun 2018 dengan target 36% dan realisasi 76.02% dengan capaian 211.17%. Hal ini disebabkan terbukanya peluang bagi perempuan untuk membuka usaha dan pemahaman untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga.

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, Ada dua indicator yang tidak memenuhi target pada tahun 2018 yaitu :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2018 dengan target 99.4% dan realisasi 97.43% dengan capaian 98.02%. IPG menggambarkan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. Adapun dimensi untuk mengukur IPG

adalah angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata – rata lama sekolah, dan sumbangan pendapatan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.

2. Persentase perempuan dilembaga swasta pada tahun 2018 dengan target 89.50 dan realisasi 87.62 dengan capaian kinerja 97.89%. indicator ini tidak mencapai target karena factor beban kerja dan jam kerja.

Jadi dari lima indicator sasaran dapat dikatakan telah mencapai nilai yang sangat memuaskan dengan persentase diatas 90 persen keatas capaian kinerja.

b. Tabel 3.5 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	11.20	11.38	11,57
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	99.4	98.42	98.02
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	64	65.76	69.35
4.	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	%	89,25	88.61	87.62
5.	Persentase Partisipasi Perempuan di dunia Usaha	%	34	60.4	76.02
	Rata-rata capaian	%			

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka dapat kita lihat bahwa persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2017 dengan realisasi 11.38% dan pada tahun 2018 dengan realisasi 11.57 sehingga dapat dikatakan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya penerimaan kontrak

non pns setiap tahunnya dan lebih banyak tenaga perempuan dibanding laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2017 dengan realisasi 98.42 dan pada tahun 2018 dengan realisasi 98.02 sehingga dapat dikatakan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berbagai factor misalnya angka harapan hidup bagi ibu dan anak, angka melek huruf perempuan dan rata – rata lama sekolah serta sumbangan pendapatan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2017 dengan realisasi 65.76 dan pada tahun 2018 realisasi 69.35. sehingga dapat dikatakan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD mengalami peningkatan dari 20% menjadi 26%.

c. Tabel 3.6 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	11,30	11.57	102.02
2.	Indeks pembangunan Gender (IPG)	%	99.8	98.02	99,39
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	71.7	65.76	105.22
4	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Swasta	%	90.50	87.62	96.81
5	Persentase Partisipasi Perempuan di dunia Usaha	%	38.50	60,4	155.95

Jika melihat perbandingan antara target kinerja jangka menengah dengan realisasi sampai dengan tahun ini ada beberapa indicator yang sudah mencapai target yaitu : Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan dengan akhir RPJMD 11.30%

dengan kondisi saat ini sudah mencapai 11.57% dengan capaian 102.2%. Hal ini disebabkan tingginya partisipasi dan minat perempuan untuk bekerja dilembaga pemerintahan dan selalu menggunakan kesempatan atau peluang jika ada penerimaan CPNS maupun kontrak. Dan persentase partisipasi perempuan di dunia usaha dengan target jangka menengah 38.50% dan realisasi sampai tahun 2018 realisasi 60.4%.

Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja jangka menengah yaitu : Indeks Pembangunan gender dengan target jangka menengah 99.8% dan realisasi sampai dengan tahun 2018 adalah 98.02%, Indeks Pemberdayaan Gender dengan target jangka menengah 71.7% dan realisasi sampai dengan tahun 2018 adalah 65.76%, Persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta dengan target jangka menengah 90.50% dengan realisasi 87.62%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya Kualitas hidup Perempuan dalam berbagai bidang pembangunan** ini didukung dengan kebijakan pemerintah dan besarnya peluang yang diberikan pemerintah kepada perempuan untuk berperan serta dalam berbagai sektor dibidang pembangunan. Hal ini kita dapat lihat dari persentase perempuan dilembaga pemerintahan, Indeks Pemberdayaan Gender dan persentase partisipasi perempuan didunia usaha yang telah mencapai target.

Adapun kegagalan atau penurunan dalam mencapai target seperti IPG dan Persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta karena adanya peran ganda yang dimiliki oleh perempuan

sehingga membatasi waktu untuk bekerja sebagaimana laki-laki bekerja dilembaga swasta.

e. Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan anggaran (%)	Realisasi Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya Kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	87.821.050	87.221.050	99.32	123.75	Efisien 24.43%

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Dalam Berbagai Bidang Pembangunan** ini adalah sebesar 87.821.050,- dengan realisasi 87.221.050,- dengan persentase 99.32%. Sedangkan capaian realisasi kinerja 123.75%. Karena realisasi capaian kinerja lebih tinggi dibanding serapan anggaran maka dapat dikatakan efisien sebesar 24.43%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dalam berbagai bidang pembangunan** ini adalah sebanyak 2 program dan 2 kegiatan, yaitu:

- a. Program Pemberdayaan perempuan dan Kesetaraan Gender Dengan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Peran Dan Fungsi Perempuan Dibidang Politik Dan Jabatan Public.

- b. Program Peningkatan kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak dengan kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera.

2. Sasaran II “Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Termasuk Ketersediaan Data Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat”

Dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan sasaran meningkatnya Kemampuan Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Termasuk Ketersediaan Data dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam berbagai Bidang Pembangunan memiliki Indikator sebanyak 3 Indikator kinerja yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

a. Tabel 3.8 Perbandingan antara Target dan Realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak, termasuk ketersediaan data dan Peningkatan Partisipasi masyarakat	1. Persentase Perempuan dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	27	38.46	142
	2. Persentase Partisipasi angkatan kerja Perempuan	%	90	51.33	57.03
	3. SKPD yang menerapkan PPRG	%	15	100	666.67
Rata-rata capaian					288.57

Dari Tabel diatas terlihat bahwa tiga (3) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini telah mencapai target ada 2 (dua) yaitu

1. Persentase Perempuan dalam organisasi social kemasyarakatan dengan pada tahun 2018 dengan target 27% dan realisasi 38.46% dengan capaian kinerja 142%. Meskipun mengalami peningkatan perempuan yang terjun di organisasi kemasyarakatan akan tetapi dalam menduduki jabatan strategis di suatu organisasi masih rendah.
2. SKPD yang menerapkan PPRG pada tahun 2018 dengan target 15% dan realisasi 100% dengan capain kinerja 666.67%. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya pemahaman para perencana SKPD tentang PPRG sehingga dapat menganggarkan anggaran disetiap SKPD yang responsive gender.

Adapun Indikator yang tidak mencapai target pada tahun 2018 adalah Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dengan target 90% dan realisasi 51.33%. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi angkatan kerja adalah usia angkatan kerja yang masih bersekolah dan merasa belum memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah dengan golongan usia 15-19 tahun, dan usia 60 tahun keatas mengalami penurunan untuk bekerja.

a. **Tabel 3.8 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1.	Persentase Perempuan dalam organisasi Sosial kemasyarakatan	%	27	40.05	38.46
2.	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	90	99	51.33
3.	SKP yang menerapkan PPRG	%	15	31.5	100
Rata-rata capaian					

Jika dilihat capaian kinerja antara tahun sebelumnya pada sasaran **Meningkatnya kualitas Kemampuan kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan Peningkatan Partisipasi masyarakat** ada yang mengalami peningkatan dan penurunan pada indicator kinerja dari tahun sebelumnya. Adapun indicator yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya adalah :

1. SKPD yang menerapkan PPRG dengan target pada tahun 2017 realisasi 31.5% sedangkan pada tahun 2018 realisasi 100%. Sehingga mengalami peningkatan sebesar 68.5%.

Sedangkan indicator yng mengalami penurunan capaian dari tahun sebelumnya adalah Persentase Partisipasi Perempuan dalam Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2017 dengan realisasi 40.05% dan pada tahun 2018 dengan realisasi 38.46%. Sehingga dapat dikatakan mengalami penurunan 1.59%. Hal ini disebabkan peran ganda yang dimiliki perempuan sehingga aktivitas domestic lebih banyak menguras tenaga, energy dan pikiran.

b. Tabel 3.9 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase Perempuan dalam Organisasi kemasyarakatan	%	30	38.46	128
2.	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	91.50	51.33	56.09
3.	SKPD yang Menerapkan PPRG	%	30	100	333.33

Jika dilihat capaian kinerja antara target jangka menengah dan realisasi pada tahun 2018 pada sasaran **Meningkatnya kualitas Kemampuan kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan Peningkatan Partisipasi masyarakat** ada indikator yang telah mencapai target dan ada yang belum mencapai target. Adapun indikator yang telah mencapai target adalah :

1. Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan dengan target jangka menengah 30% dan pada tahun 2018 realisasi 38.46% dengan capaian kinerja 128%. Hal ini disebabkan besarnya peluang yang diberikan kepada perempuan untuk berpartisipasi dan dibarengi dengan pemahaman para perempuan tentang pentingnya peran perempuan aktif di organisasi kemasyarakatan.
2. SKPD yang menerapkan PPRG dengan target jangka menengah 30% dan pada tahun 2018 realisasi 100%. Hal ini disebabkan meningkatnya pemahaman para perencana SKPD tentang anggaran responsive gender.

Sedangkan indikator yang belum mencapai target jangka menengah adalah persentase partisipasi angkatan kerja perempuan dengan target 91.50% dan realisasi 51.33%. Sehingga capaian kinerja mencapai 56.09%. Hal ini disebabkan usia produktif bekerja bagi perempuan mulai 15 tahun sampai dengan 65 tahun. Dimana usia 15 tahun sampai dengan 25 tahun digunakan untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi dan belum memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah. Sedangkan usia 60 tahun keatas sudah banyak yang mengalami penurunan fisik untuk bekerja secara produktif. Meskipun peluang dan kesempatan pekerjaan terbuka lebar bagi perempuan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat**, ini didukung dengan peran aktif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pembinaan dan sosialisasi yang didukung oleh semua SKPD atau lembaga yang terkait.

d. Tabel 3.10 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan anggaran (%)	Realisasi Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat	59.971.000	59.971.00	100%	288.57	Efisien 188.57

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat** ini adalah sebesar Rp. 59.971.100 dengan realisasi 59.971.100 dengan persentase 100%. Sedangkan realisasi capaian kinerja mencapai 288.57. Karena realisasi Capaian kinerja lebih tinggi dibanding serapan anggaran maka dapat dikatakan efisien sebesar 188.57%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan Gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat** ini adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan, yaitu: **Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dan Kegiatan Sosialisasi Pembentukan**

dan Penguatan Focal Poin PUG, dan Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

3. Meningkatnya efektifitas Perlindungan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Analisis pencapaian sasaran kinerja yang ke 3 yaitu Meningkatnya Efektifitas Perlindungan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Tabel 3.11 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Efektifitas Perlindungan kepada Perempuan dan Anak Korban kekerasan, dan menurunnya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1. Ratio KDRT	%	0,030	0.005	566.67
	2. Jumlah lembaga perlindungan Anak	Lembaga	7	7	100
	3. Angka melek huruf Perempuan Usia 15 tahun Keatas	%	99,75	99.41	99.65
Rata-rata capaian					255.44

Jika melihat perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja pada tahun 2018 dalam mencapai sasaran “meningkatnya Efektifitas Perlindungan Kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Menurunnya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” ada 2 indikator yang telah memenuhi target yaitu :

1. Ratio KDRT pada tahun 2018 dengan target 0.030% dan realisasi 0,005%. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah kekerasan menurun sebesar 566.67%. Hal ini disebabkan

intensnya pembinaan serta sosialisasi tentang kekerasan perempuan dan anak dalam upaya mencegah kekerasan. Sehingga pemahaman masyarakat mulai meningkat tentang hukum kekerasan bagi perempuan dan anak. Dan adanya pendampingan – pendampingan yang dilakukan terhadap korban kekerasan.

2. Jumlah Lembaga Perlindungan Anak pada tahun 2018 dengan target 7 lembaga dan realisasi 7 lembaga. Pencapaian target ini karena adanya upaya – upaya untuk mendorong masyarakat membentuk lembaga – lembaga perlindungan anak disetiap kelurahan ataupun desa. Sehingga memudahkan koordinasi dalam pendampingan – pendampingan terhadap perempuan dan anak.

Adapun indikator yang tidak memenuhi target pada tahun 2018 yaitu angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas dengan target 99.75 dan realisasi 99.41. Hal ini tidak mencapai target karena bisa disebabkan adanya umur 14 tahun sebelumnya yang tidak tersentuh oleh program pemerintah penuntasan buta huruf.

b. Tabel 3.12 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1.	Ratio KDRT	%	0,030	0.001	0.005
2.	Jumlah lembaga perlindungan anak	Lembaga	7	6	7
3.	Angka melek huruf Perempuan Usia 15 tahun ketas	%	99,75	99.89	99.41
Rata-rata capaian					

Jika dilihat capaian kinerja periode renstra yang lalu, maka indicator kinerja pada sasaran **Meningkatnya Efektifitas Perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak** yang mengalami peningkatan adalah :

1. Jumlah Perlindungan Anak pada tahun 2017 realisasi sebanyak 6 lembaga dan pada tahun 2018 realisasi sebanyak 7 lembaga. Sehingga mengalami peningkatan 16.67%. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan dan motivasi dari DPPPA untuk membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak di setiap kelurahan atau desa agar memudahkan koordinasi jika terjadi kekerasan.

Sedangkan indicator yang mengalami penurunan adalah :

1. Ratio KDRT pada tahun 2017 dengan realisasi 0.001% dan pada tahun 2018 realisasi 0.005% dengan capaian penurunan 0.004%. Hal ini disebabkan adanya keberanian masyarakat khususnya perempuan dan anak untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun diluar rumah.
2. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas pada tahun 2017 dengan realisasi 99.89% dan pada tahun 2018 realisasi 99.41% sehingga mengalami penurunan 0.48%. Hal ini bisa disebabkan adanya perempuan yang usia 14 tahun sebelumnya tidak tersentuh oleh program penuntasan buta huruf sehingga pada tahun selanjutnya menjadi meningkat.

c. TABEL 3.13 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Ratio KDRT	%	0.024	0.005	520.83
2.	Jumlah lembaga perlindungan anak	Lembaga	9	7	63
3.	Angka Melek Huruf Perempuan usia 15 Tahun keatas	%	99,90	99.41	99.51

Jika melihat perbandingan antara target jangka menengah dan realisasi rata-rata sampai dengan tahun 2018, ada 1 indikator yang telah memenuhi target kinerja jangka menengah yaitu Ratio KDRT yang mengalami penurunan dari target 0.024 dengan realisasi 0.005 sehingga capaian kinerja mencapai 520.83%. Sedangkan indikator yang belum mencapai target adalah Jumlah Lembaga Perlindungan Anak dengan target jangka menengah 9 dan realisasi 7 sehingga capaian 63%. Dan angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas dengan target jangka menengah 99.90 dan realisasi sampai dengan tahun 2018 adalah 99.41% sehingga capaian 99.51%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya Efektifitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak**, ini didukung dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta undang – undang yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberantasan buta aksara dengan melaksanakan sosialisasi mendorong perempuan untuk harus pandai membaca dan menulis

dengan mengikuti paket atau program pemerintah, dan serta mendorong para lurah atau kepala desa untuk membentuk lembaga PATBM sebagai upaya penguatan kelembagaan dalam menciptakan kota layak anak yang bebas dari kekerasan.

e. Tabel 3.14 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya Efektifitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	116.443.550	114.843.500	98.63	255.44	Efisien 156.81

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Efektifitas Perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak** sebesar Rp.116.443.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.843.500,-. Karena realisasi capaian kinerja sebesar 255.44% lebih besar dibanding serapan anggaran sebesar 98,63% persen maka dapat dikatakan efisien sebesar 156.81.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Efektifitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak** ini adalah sebanyak 2 program dan 4 Kegiatan yaitu **program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan**

gender dengan 2 kegiatan yaitu Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan KDRT dan penguatan pengembangan kelembagaan P2TP2A **dan program peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan anak** dan 2 kegiatan, yaitu: Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan penghapusan kekerasan terhadap anak dan sosialisasi pencegahan anak dari tindak kekerasan.

4. Meningkatnya Kesejahteraan, tumbuh kembang dan Perlindungan Anak

Sasaran Kinerja keempat yaitu Meningkatnya Kesejahteraan, Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak dengan beberapa indikator kinerja yang dapat dilihat capaiannya untuk tahun 2018 berikut ini :

a. Tabel 3.15 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan anak	1. Persentase Penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap anak	%	100	100	100
	2. Jumlah kecamatan Ramah Anak	buah	4	8	200
Rata-rata capaian					150%

Dari tabel diatas terlihat bahwa 2 Indiktor kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, semuanya telah mencapai target yaitu :

1. Persentase penyelesaian kasus terhadap anak pada tahun 2018 dengan target 100% dan realisasi 100%. Sehingga

capaian kinerja 100%. Target ini tercapai karena meningkatnya pemahaman dari para stakeholder dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun ini tercapai akan tetapi tetap perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan serta pencegahannya.

2. Jumlah kecamatan ramah anak pada tahun 2018 dengan target 4 kecamatan dan terealisasi 8 kecamatan. Sehingga mencapai 200%. Hal ini disebabkan dukungan dari para pihak yang terkait dalam upaya menciptakan kota layak anak yang dimulai dari pembentukan kecamatan ramah anak.

b. Tabel 3.16 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		satuan	Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1.	Persentase Penyelesaian Pengaduan terhadap anak kekerasan	%	100	100	8
2.	Jumlah Kecamatan Anak	Kecamatan	4	2	8

Jika dilihat capaian kinerja periode renstra pada tahun 2017 dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan anak, semua indikator mengalami capaian yang sama yaitu persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 realisasi 100% dan pada tahun 2018 realisasi 100%. Dan jumlah kecamatan ramah anak pada tahun 2017 realisasi 2 kecamatan dan pada tahun 2018 dengan realisasi 8 kecamatan.

c. **Tabel 3.17 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase Penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap anak	%	100	100	100
2.	Jumlah Kecamatan Ramah Anak	Kecamatan	8	8	100

Jika melihat target jangka menengah dan realisasi sampai dengan tahun ini, kedua indikator telah mencapai target yaitu persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap anak dengan target jangka menengah 100% dengan realisasi sampai dengan tahun ini 100% dengan capaian 100%. Dan indikator Jumlah kecamatan ramah anak dengan target jangka menengah 8 kecamatan dan tahun 2018 realisasi 8 kecamatan dengan capaian 100%

d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan Anak**, ini didukung dengan peran aktif stekholder penanganan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk dari Unit P2TP2A, Polres Soppeng, Pihak Kejaksaan, Pengadilan dan pihak-pihak lain yang sangat berperan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dan adanya peran serta para pihak terkait dalam pembentukan kecamatan ramah anak sebagai upaya menjadikan kabupaten soppeng sebagai kota layak anak.

e. Tabel 3.18 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya Kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan anak	90.101.450	80.701.450	89.56	150	Efisien 60.44

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan anak adalah sebesar Rp.90.101.450, terealisasi sebesar Rp. 80.701.450,-. Karena realisasi capaian kinerja mencapai 150% lebih besar dibanding dengan serapan anggaran 89.56% maka dapat dikatakan efisien sebesar 60.44 %

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan anak** ini adalah sebanyak 2 program dan 4 kegiatan, yaitu: **Program Pertama Program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender** dengan kegiatan Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dan Penguatan dan pengembangan P2TP2A. **Program Kedua Peningkatan Kualitas Keluarga Dan Perlindungan Anak** dengan kegiatan Pertemuan

forum anak kabupaten dan pemilihan dewan anak, pembentukan dan pengembangan kota layak anak.

5. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Adminstrasi Umum dan Keuangan

Analisis pencapaian sasaran kinerja yang ke 5 yaitu Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tabel 3.19 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	1. Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Administarsi Umum dan Keuangan	%	100	100	100
Rata-rata capaian					100

Dari tabel diatas terlihat bahwa Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan pada tahun 2018 dengan target 100% dan relaisasi 100% berarti capaian kinerja mencapai 100 %. Hal ini bisa diketahui melalui survey terhadap pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berarti capaian kinerja untuk sasaran ini sangat memuaskan.

b. Tabel 3.20 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1.	Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan Administrasi umum dan Keuangan	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja periode renstra yang lalu pada tahun 2017 realisasi 100% dan pada tahun 2018 realisasi 100%, maka secara Umum capaian kinerja pada sasaran Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan umum dan keuangan mengalami capaian yang sama yaitu 100%. Dengan capaian sangat memuaskan.

c. Tabel 3.21 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan.	%	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas pada indicator persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan dengan target jangka menengah 100% dan realisasi pada tahun 2018 100% maka dapat kita katakan telah mencapai target kinerja.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan Keuangan**, karena adanya kedisiplinan para pegawai dalam menjalankan standar operasional pelayanan yang diterapkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

e. Tabel 3.22 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	699.939.925	689.036.950	97.22	100	Efisien 2.77

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan adalah sebesar Rp. 699.939.925,- dan terealisasi sebesar Rp. 689.036.950,-. Karena realisasi capaian kinerja lebih tinggi sebesar 100% dibanding serapan anggaran sebesar 97.22 % maka dapat dikatakan tingkat efisien sebesar 2.77 %.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun program yang mendukung untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 3 Program dan 11 kegiatan yaitu :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 8 kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional .
 - Penyediaan layanan kebersihan kantor
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan bahan logistic kantor
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
 - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan profesionalisme aparatur dengan 1 Kegiatan yaitu :
 - 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 kegiatan yaitu :
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan laporan akhir tahun

6. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor

Analisis pencapaian sasaran kinerja yang ke 6 yaitu Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tabel 3.23 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	1. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	96.61	96.61
	Rata-rata capaian				
					100

Dari tabel diatas terlihat bahwa Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik pada tahun 2018 dengan target 100% dan realisasi 96.61% berarti capaian kinerja mencapai 96.61 %. Hal ini bisa dilihat adanya pengadaan sarana dan prasarana dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana. Meskipun masih ada beberapa unit sarana dan prasarana yang mengalami kondisi kerusakan.

b. Tabel 3.24 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1. Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100	100	96.61

Berdasarkan tabel di atas periode renstra yang lalu pada tahun 2017 realisasi 100% sedangkan pada tahun 2018 realisasi 96.61% berarti capaian kinerja mengalami penurunan sekitar 3.39%, Hal ini bisa disebabkan adanya beberapa sarana dan prasarana yang tidak bisa lagi diperbaiki.

C. Tabel 3.25 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	96.61	100

Berdasarkan tabel di atas indikator sarana dan prasarana dalam kondisi baik dengan target jangka menengah 100% dan realisasi pada tahun 2018 realisasi 96.61% berarti capaian kinerja mengalami penurunan sekitar 96.61%.

a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian indikator sarana dan prasarana dalam kondisi baik sebesar 96.61% meskipun tidak mencapai target karena adanya beberapa unit dalam kondisi parah yang tidak bisa diperbaiki.

b. Tabel 3.26 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Persentase sarana dan prasarana kantor	160.956.850	151.578.900	94.17	96.61	Efisien 2.44

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk Persentase sarana dan Prasarana kantor adalah sebesar Rp.160.956.850,- terealisasi sebesar Rp. 151.578.900,- . Karena realisasi capaian kinerja 96.61% lebih besar dari serapan anggaran sebesar 94.17 % maka dapat dikatakan efisien sebesar 2.44%.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun program yang mendukung untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 Program dan 3 kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 3 Kegiatan yaitu :
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Tabel 3.27 : Realisasi dan Capaian Program/Kegiatan

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target 2018	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan Administrasi umum dan keuangan	Program pelayanan perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	4 Unit	4 Unit	100%
	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	1 org petugas kebersihan 10 jenis peralatan kebersihan	1 org petugas kebersihan 10 jenis peralatan kebersihan	100 %
	Penyediaan komponen Instalasai listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	2 jenis	100 %
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	26 jenis	26 jenis	100 %
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan /peraturan perundang-undangan	6 terbitan	6 terbitan	100%
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah pengisian gas	12 kali	12 kali	100 %
	Rapat-Rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	560 kali	734 kali	524,29 %
	Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	15 paket	15 paket	100 %
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Sarana dan prasarana kantor	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	100%	100 %

	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 jenis	6 jenis	100 %
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 kendaraan roda empat 3 kendaraan roda dua	1 kendaraan roda empat 3 kendaraan roda dua	100 %
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	26 unit	26 unit	100%
Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Program peningkatan Profesionalisme aparatur	Persentase peningkatan kedisiplinan ASN	100%	100%	100 %
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bintek	10 orang	11 orang	110 %
Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Program peningkatan Pengembangan system Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat awaktu	100 %	100 %	100 %
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kineja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	100 %
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan semesteran/akhir tahun	2 Laporan	2 Laporan	100 %
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Program pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	89,60 %	89,60 %	89,60 %
	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah peserta pelatihan pelayanan pendampingan KDRT	60 orang	60 orang	100 %
	Sosialisasi Kebijakan peningkatan peran dan fungsi perempuan dibidang politik dan jabatan public	Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	200 orang	100 %

	Penguatan dan pengembangan kelembagaan P2TP2A	Jumlah peserta pertemuan pengurus P2TP2A	90 orang	90 Orang	100 %
	Sosialisasi Pembentukan dan Penguatan Focal point PUG	Jumlah peserta rapat sosialisasi	75 orang	75 orang	100 %
	Penyusunan profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Meningkatnya efektivitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak	Ratio KDRT	0,030 %	0,005 %	
	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan	100 keluarga	100 keluarga	100 %
	Pertemuan forum anak Kabupaten dan pemilihan Dewan Anak	Jumlah peserta forum anak	165 orang	165 orang	100 %
	Pembentukan dan pengembangan kabupaten layak anak	Jumlah kecamatan ramah anak	8 kecamatan	8 kecamatan	500 %
	Pelatihan pola asuh anak dalam keluarga	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	50 orang	100 %
	Sosialisasi pencegahan anak dari tindak kekerasan	Jumlah peserta sosialisasi	400 orang	400 orang	100 %

Tabel : Tabel 3.28 Realisasi dan Capaian Indikator Program pada RPJMD

NO	Indikator RPJMD	Target 2018	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks pembangunan Gender (IPG)	99,4	97.43	99,39
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64	69,35	108.35
3.	Persentase Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan	11,20	11,57	103,3
4.	Persentase partisipasi perempuan di dunia usaha	36	60,4	166.78
5.	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	25	38.4	162

B. REALISASI ANGGARAN

Belanja SKPD Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 2.518.432.632,- Dengan Realisasi sebesar Rp.2.453.066.145- (97,40 %).

- a. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp.1.352.993.632,- Dan tereliasasi sebesar Rp. 1.327.702.995,- (98.13%) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.29 Belanja tidak langsung

No	Uraian	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja pegawai	2.518.432.632,-	2.453.066.145	97.40

- b. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan sebesar Rp.1.165.439.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.125.363.150,- (96.56%) dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 3.30 : Realisasi Belanja langsung

No	Uraian	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	38.500.000	38.500.000,-	100
2	Belanja barang dan jasa	1.013.895.150,-	926.753.887,-	91.41
3	Belanja Modal	286.234.850,-	272.733.130,-	95.28

Alokasi dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan

Anak tahun 2018 sebesar Rp.1.165.439.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.125.363.150,- (96.58%) sebagaimana rincian pada tabel berikut :

Tabel 3.31 : Realisasi Anggaran Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	579.597.950,-	573.129.073,-	96.58
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik	35.760.000,-	32.947.873,-	92.14
	2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.950.000,-	1.119.500,-	37.95
	3. Penyediaan layanan kebersihan kantor	10.600.000,-	10.600.000,-	100
	4. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1.858.000,-	1.858.000,-	100
	5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000,-	6.230.000,-	77.88
	6. Penyediaan bahan logistik kantor	2.040.000,-	2.040.000,-	100
	7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	288.139.950,-	288.122.100,-	99,99
	8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	230.250.000,-	230.211.600,-	99,98
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	160.956.850,-	151.578.900,-	94.17
	1. Pengadaan Peralatan Gedung kantor	84.364.000,-	80.699.900,-	95.56
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	61.092.850,-	60.259.000,-	98.64
	3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.500.000,-	10.620.000	68.52

III	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	94.439.000,-	81.810.202,-	86.63
	1. Bimbingan Tehnis Implementasi peraturan perundang-undangan	94.439.000,-	81.810.202,-	86.63
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000,-	14.999.925,-	100
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,-	10.000.000,-	100
	2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000,-	4.999.925,-	100
VI	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	134.684.250,-	134.684.250,-	100
	1. Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	25.420.950,-	25.420.950,-	100
	2. Sosialisasi Kebijakan peningkatan peran dan fungsi perempuan dibidang politik dan jabatan public	35.821.100,-	35.821.100,-	100
	3. Penguatan dan pengembangan kelembagaan P2TP2A	13.471.100,-	13.471.100,-	100
	4. Sosialisasi Pembentukan dan Penguatan Focal point PUG	32.571.100,-	32.571.100,-	100
	5. Penyusunan profil Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	27.400.000,-	27.400.000,-	100
VII	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak	180.760.950,-	169.160.800,-	93.58
	1. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	51.999.950,-	51.399.950,-	98.85
	2. Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan pemilihan Dewan Anak	25.167.200,-	25.167.200,-	100
	3. Pembentukan dan Pengembangan Kota Layak Anak	26.042.200,-	16.642.200,-	63.90
	4. Pelatihan pola asuh anak dalam keluarga dan penghapusan kekerasan terhadap anak	19.796.100,-	19.796.100,-	100

	5. Sosialisasi pencegahan anak dari tindak kekerasan	56.155.350,-	56.155.350,-	97.23
--	--	--------------	--------------	-------

Realisasi keuangan yang mencapai rata-rata 90% keatas adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi sebesar 96.58%, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan realisasi sebesar 94.17%, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi sebesar 100%, Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dengan realisasi sebesar 100% dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak dengan realisasi sebesar 93,58%. Sedangkan Program yang yg realisasi keuangan 90% kebawah adalah Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur dengan capaian realisasi keuangan sebesar 86.63%.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 yang disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam implementasi program dan kegiatan tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja yang telah dirumuskan, telah dicapai suatu keberhasilan baik target kinerja maupun realisasi anggaran. Namun disadari bahwa masih ada beberapa hal dinilai kurang berhasil, Hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Capaian kinerja yang di hasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng tahun 2018 adalah : dari Sasaran yang pertama Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dalam berbagai bidang pembangunan bisa dicapai 123.75 % dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan Gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan 3 (Tiga) indikator kinerja capaiannya 288.57 %. Sasaran yang ketiga yaitu ; Meningkatnya efektifitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 3 (Tiga) indicator kinerja yang capaiannya 255.44%. Sasaran ke empat yaitu : Meningkatnya kesejahteraan , tumbuh kembang dan perlindungan anak dengan indikator Kinerja sebanyak 2 (Dua) dan Capaiannya 150%.

Dari segi penyerapan anggaran selama tahun 2018 ini dari Jumlah Anggaran Rp. 1.165.439.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.125.363.150- atau sebesar 96.56%.

Sementara dari segi prestasi yang dicapai selama tahun 2018 yaitu :

1. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu MAN I sebagai sekolah ramah anak.
2. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu kabupaten soppeng sebagai kota layak anak dengan kategori PRATAMA
3. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu APE (Anugerah Parahita Ekaparaya) dengan kategori Madya.
4. Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan sebagai kabupaten yang memiliki komitmen mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan sebagai kabupaten yang melaksanakan percepatan peningkatan peran keluarga menuju ketahanan dan kesejahteraan (P2K3) di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng

Dari capain kinerja yang maksimal dicapai tahun 2018 ini didorong oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta ini menandakan bahwa kesetaraan gender sudah lebih dipahami oleh masyarakat kita, IPG Kabupaten

Soppeng yang memang sudah sangat tinggi, ini dikarenakan karena Soppeng sudah masuk dalam 10 (sepuluh) besar IPG tertinggi di Sulawesi Selatan, kemudian terbentuknya kecamatan ramah anak sebagai upaya menjadikan kabupaten soppeng sebagai Kabupaten Layak Anak dengan predikat yang lebih tinggi lagi.

Namun selain hal tersebut beberapa hal yang menjadi perkiraan kesulitan sehingga beberapa indikator kinerja pencapaiannya kurang maksimal, antara lain, Kurangnya tenaga staf yang memiliki skill, Belum maksimalnya Aktifitas Lembaga/Organisasi Perempuan dan Peduli Anak dan Kelompok Bina Keluarga, Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, Belum tersedianya data hasil pendataan yang akurat, serta masih kurangnya biaya operasional bagi Institusi Masyarakat. Khusus untuk indikator ratio KDRT meskipun melebihi dari target penurunan namun kekerasan harus dihilangkan. Jadi yang harus dilakukan lebih gencar lagi dalam sosialisasi tentang KDRT sampai ke desa-desa sebagai upaya pencegahan dari tindak kekerasan.

Guna mengatasi kendala-kendala yang ada maka solusi terbaik yang dapat ditempuh adalah :

1. Menambah staf dan meningkatkan kualitasnya melalui kegiatan pendidikan, pembinaan dan pelatihan.
2. Meningkatkan koordinasi, pembinaan teknis operasional, dan fasilitasi yang sinergi, serta keterpaduan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak .
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4. Sosialisasi secara kontinyu bagi aparat pemerintah (khususnya bagi penentu kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota) tentang Pengarus Utamaan Gender.
5. Komitmen Pemerintah Daerah untuk implementasi kebijakan pemerintah pusat.

Demikianlah laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng tahun 2018 dan tentunya harapan kami kedepan program dan kegiatan yang berhubungan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat lebih ditingkatkan dan semua kendala-kendala yang dihadapi dapat dicarikan solusi terbaik, sehingga pencapaian kinerja dapat tercapai.

Watansoppeng, 25 Januari 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KAB.SOPPENG

Dra. Hj. ANDI NUR LINA, MM.

Pangkat : Pembina Utama Mudaip .

Nip . :19661227 199303 2 010

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Komposisi SDM berdasarkan Gender	12
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai DPPPAA menurut kepangkatan	12
Tabel 1.3	Komposisi PNS menurut Jejang Pendidikan	13
Tabel 1.4	Perimbangan PNS per jenjang pendidikan dan terpilah jenis kelamin	14
Tabel 1.5	Komposisi jabatan struktural	15
Tabel 2.1	Tujuan dan indikator Kinerja DPPPAA	20
Tabel 2.2	Sasaran dan indikator Kinerja DPPPAA	22
Tabel 2.3	Program untuk pencapaian sasaran	24
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja	26
Tabel 1.4	Perimbangan PNS per jenjang pendidikan dan terpilah jenis kelamin	14
Tabel 1.5	Komposisi jabatan struktural	15
Tabel 2.1	Tujuan dan indikator Kinerja DPPPAA	20
Tabel 2.2	Rencana Anggaran	28
Tabel 3.1	Skala dan Peringkat Nilai Kerja	32
Tabel 3.2	Skala Peringkat Kinerja Terbalik	33
Tabel 3.3	Pencapaian IKU	34
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	Sasaran I 36

Tabel 3.5	dan indikator Kinerja DPPP	20
Tabel 2.2	Sasaran dan indikator Kinerja DPPP	22
Tabel 2.3	Program untuk pencapaian sasaran	24
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja	26

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	11
Gambar 1.2	Presentase PNS menurut jenjang Pendidikan	14

